BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh implementasi kebijakan tentang Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) terhadap kualitas pelayanan sertifikasi tanah di Kantor Pertanahan Kota Cimahi adalah:

1. Implementasi kebijakan tentang sistem KKP di Kota Cimahi sebagai sarana pengolahan data sertifikasi tanah sebesar 73,24% termasuk dalam kategiri Kuat. Artinya implementasi kebijakan tentang sistem KKP sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.
2. Kualitas pelayanan sertifikasi tanah di Kantor Pertanahan Kota Cimahi sebesar 68,66% termasuk dalam kategori Kuat. Artinya kualitas pelayanan sertifikasi tanah yang diberikan kepada masyarakat sudah berjalan sesuai prosedur, dan memberikan kontribusi pelayanan yang prima.
3. Pengaruh implementasi kebijakan tentang sistem KKP terhadap kualitas pelayanan sertifikasi tanah di Kantor Pertanahan Kota Cimahi mempunyai tingkat korelasi **sedang** yaitu sebesar 0,542. Sedangkan nilai uji hipotesisnya menunjukan nilai yang signifikan yaitu 5,91, dimana t_{tabel} nya adalah sebesar 2,639, hal itu berarti menunjukan penolakan Ho dan penerimaan terhadap Ha. Yaitu terdapat pengaruh anatar implementasi kebijakan tentang Sistem KKP terhadap kualitas

pelayanan sertifikasi tanah di kantor pertanahan kota cimahi. Dengan determinasi sebesar 29,38% yang berarti implementasi kebijakan tentang sistem KKP mempengaruhi kualitas pelayanan sebesar 29,38% dan sisanya sebesar 70,62% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

5.2 Saran

Saran peneliti bagi kantor pertanahan kota cimahi dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan sertifikasi tanah adalah:

1. Kebijakan sistem KKP di Kantor Pertanahan Kota Cimahi lebih ditingkatan demi menunjang pelaksanaan pelayanan sertifikasi tanah, dengan menambah sumberdaya aparatur yang mahir dalam bidangnya.
2. Kualitas pelayanan sertifikasi tanah kepada masyarakat perlu diperhatikan oleh setiap bagian/bidang yang terdapat di Kantor Pertanhan Kota Cimahi sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi, cepat dan tepat waktu.
3. Sikap transparansi kepada masyarakat sebaiknya diterapkan lebih maksimal, tidak memandang sebelah mata agar tidak ada pihak ketiga dalam pelayanan sertifikasi tanah di Kantor Pertanahan Kota Cimahi. Sebagai penunjang implementasi kebijakan sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) dalam meningkatkan kualitas pelayanan sertifikasi tanah.